

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Desa dalam Ketentuan Umum menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan perdesaan menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kawasan yang mempunyai kegiatan ekonomi utama pada bidang pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Masih ada daerah-daerah yang mengalami ketertinggalan untuk itu dibutuhkan kecepatan untuk mengejar aneka ketertinggalan, khususnya yang dialami oleh desa, sehingga yang diperlukan saat ini adalah berlari. Pada titik ini, desa tak akan bisa berlari apabila hanya fokus kepada wilayahnya masing-masing. Tiap desa memang memiliki kekayaan dan keragaman sumber daya (ekonomi), namun menjadi terserak dan tersebar menjadi kekuatan yang lemah apabila titik tumpunya berada pada masing-masing kaki desa. Dibutuhkan kolaborasi antardesa untuk memastikan sumber daya yang dimiliki menjadi satu kekuatan utuh dan menjadi gerakan kolektif yang terpadu. Himpunan dari beberapa desa

yang mendorong konsensus inilah yang disebut sebagai maklumat pembangunan “kawasan perdesaan”. Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perintah dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Batasan yuridis dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) merumuskan frasa Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

“Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi”. Frasa “Kawasan Perdesaan” mengandung kebijakan secara eksplisit tentang tata ruang kawasan perdesaan yang bertumpu pada pola penghidupan pertanian. Pola penghidupan pertanian tersebut didukung dengan pengelolaan sumber daya alam. Fungsi Kawasan Perdesaan meliputi 4 (empat) fungsi yaitu tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Hal ini dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui

pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Fungsi utama kawasan adalah sebagai lokus terjadinya proses pendalaman (*deepening*) pembangunan. Fungsi ini, mempertemukan potensi tiap-tiap desa menjadi satu rumusan kegiatan pembangunan yang punya bobot kesejahteraan. Aktivitas ekonomi tak hanya dirayakan sebagai ritus kebudayaan (seperti yang tersingkap dari makna kata “agriculture”), namun juga proses imodernisasi yang bertumpu kepada kreativitas dan inovasi sehingga nilai tambah menjadi hal yang niscaya. Fungsi penting lainnya adalah mengerjakamkan (*collaborating*) banyak pemangku kepentingan yang berkehendak memajukan desa. Pemerintah (pusat dan daerah), kampus, lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha (milik pemerintah dan swasta), dan yang lain punya harapan yang sama untuk mendorong pembangunan desa. Sungguh pun begitu, mengorganisasikan aneka pemangku kepentingan ini tak mudah dan tidak bisa disangga hanya oleh desa, tetapi cakupan perangkat dan wilayah yang cukup besar. Inilah fungsi yang bisa diperankan oleh kawasan perdesaan. Menurut Anwar Sanusi (2019), terdapat banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pengembangan kawasan perdesaan, seperti halnya Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama. Menurutnya, pengembangan ekonomi dengan pendekatan kawasan seperti ini akan lebih efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.

Eko Putro Sandjojo (2018) berpendapat bahwa model Prukades akan mendatangkan dunia usaha ke desa karena desa telah memiliki skala ekonomi yang besar. Akses modal akan mudah diperoleh apabila suatu desa berfokus pada satu produk unggulan dan melakukan keberlanjutan produksi produk unggulan tersebut. Selain itu juga akan menciptakan lapangan pekerjaan karena terbangunnya industri produksi di desa. Selanjutnya kata Eko Putri Sandjojo, Pembuatan Produk Unggulan Desa akan berdampak pada membuka lapangan kerja baru dan peluang usaha baru, dengan adanya lapangan kerja dan peluang usaha baru secara otomatis akan meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja dan mengurangi Pengangguran yang ada di Desa . Selain itu masih banyak keuntungan Prukades lainnya. Pasalnya, apabila desa sudah fokus pada satu produk unggulan, maka akan muncul petani-petani yang fokus membudidayakan komoditi tertentu. Ketika mereka fokus dan didukung dengan peningkatan kapasitas, belajar bersama antar petani, maka petani akan semakin terampil dan ahli.

Dari 39 pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019, untuk wilayah Provinsi Gorontalo yang termasuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), masing-masing berada di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo. Berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 271/07/IV/2016** Tentang “ Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Gorontalo ”, Kawasan Perdesaan di Kabupaten Gorontalo berada di Kecamatan Telaga Jaya dan Tilango, dimana kawasan

perdesaan terpilih ini, 2 (dua) desa yaitu Desa Hutada'adan Desa Buhu berada di Kecamatan Telaga Jaya, sedangkan 5 (lima) desa yaitu Desa Tilote, Desa Tabumela, Desa Ilotidea, Desa Lauwonu, dan Desa Tenggela berada di wilayah Kecamatan Tilango. Dengan pertimbangan bahwa ke tujuh Desa terpilih ini merupakan lokasi rintisan peningkatan pengembangan Wisata Danau Limboto tersebut maka tema pengembangannya adalah "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Danau Limboto berbasis Agro-Ekowisata". Sebagai bentuk pengembangan kawasan perdesaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo beserta Pemerintah Provinsi Gorontalo telah ikut berkontribusi melalui kebijakan pemberian bantuan baik dalam bentuk bibit, peralatan sampai dengan pelatihan-pelatihan yang bertujuan menambah ilmu dan keterampilan para petani.

Dalam kawasan ini akan dirumuskan program dan kegiatan yang membangun tingkat kesadaran penduduk tentang prospek potensi Danau Limboto sebagai sumber penghasilan penduduk melalui hasil perikanan, wisata, dan hortikultura serta membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh suatu kawasan agroekowisata.

Kawasan pengembangan perdesaan ini potensi sumberdaya alamnya relatif terbatas pada sumberdaya lahan, dan sumberdaya air danau serta berbagai biota yang hidup di dalamnya. Salah satu sumber daya potensial yang ada di wilayah kawasan pengembangan perdesaan adalah lahan untuk pertanian atau perkebunan. Sementara itu penduduk di kawasan pengembangan perdesaan semakin banyak dan demikian juga kepentingan ekonominya mulai meningkat. Tingkat perkembangan kebutuhan masyarakatnya mulai meningkat karena relatif terbuka

dan dekat dengan kawasan perkotaan. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi umumnya masih bersifat tradisional. Oleh karena berbagai alasan tersebut yaitu karakteristik sumberdaya alam, keterbatasan kapasitas penduduknya dan keterbatasan aksesibilitas kawasan maka sumberdaya alam terutama lahan yang ada di kawasan pengembangan perdesaan sebagian besar belum tereksploitasi secara optimal. Kedepan, peningkatan tekanan penduduk, kepentingan ekonomi yang ditopang oleh informasi tentang potensi sumberdaya alam termasuk lahan yang ada di kawasan tersebut, serta semakin terbukanya kawasan dengan adanya peningkatan prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi di kawasan tersebut diharapkan akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Program kawasan perdesaan ini yang dilaksanakan di Kecamatan Telaga Jaya dan Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo melaksanakan 4 program kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat yang ada di kawasan tersebut. 4 Program kegiatan tersebut yaitu :

1. Pembangunan Rumah Pajang.
2. Pembangunan Sarana Prasarana Air bersih.
3. Pembangunan Wisata Embung.
4. Pembangunan Pasar Kawasan.

Dari ke empat program yang direncanakan, hanya 3 yang terlaksana hingga saat ini yaitu pembangunan rumah pajang, pembangunan sarana prasarana air bersih serta pembangunan wisata embung dan yang tidak terlaksana hingga saat ini yaitu pembangunan pasar kawasan. Pembangunan

pasar kawasan tidak terlaksana karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDESMA Bulalo dan Tim Koordinasi Program Kawasan Perdesaan.

Pada tahun 2018, Rumah Pajang Produk Unggulan Kawasan Perdesaan telah di buka dan di resmikan. Rumah pajang ini sebagai salah satu upaya mendorong perekonomian desa, Rumah pajang tersebut menyajikan berbagai kebutuhan warga seperti layaknya retail modern yang ada di pusat kota. Terinspirasi dengan hal ini, untuk kategori desa hasil kolaborasi beberapa desa tersebut diberi nama Bumdesmart: BUMDes bersama BULALO. BUMDes bersama itu juga mempunyai kelompok tani Hortikultura di wilayah kawasan pedesaan, serta mempunyai kelompok binaan nelayan ikan tawar.

Program sarana prasana air bersih ini sudah berjalan dan mengalir di Rumah- rumah yang ada di kawasan pedesaan. Air bersih yang mengalir di rumah- rumah ini, masing-masing membayar biaya Air bersih kepada BUMDESMA bulalo dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan sarana air bersih lainnya.

Program ketiga yaitu Pembangunan Wisata Embung. Embung yang di bangun ini, di isi dengan bibit ikan sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas memancing. Wisata embung ini diharapkan memiliki multiplayer effect yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.

Secara otomatis, Program ini akan berpengaruh positif terhadap masyarakat apabila program ini terlaksana sesuai rencana. Terutama terhadap pendapatan masyarakat.

Pendapatan masyarakat sebagaimana pemikiran Rosyidi (2006) adalah arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa dan laba. Dan bahwa pendapatan perseorangan (personal income) terdiri atas sewa upah dan gaji, bunga, laba perusahaan bukan perseroan, dividen dan pembayaran transfer.

Pendapatan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu daerah, apabila pendapatan suatu daerah rendah dapat dipastikan perkembangan ekonomi masyarakat di daerah tersebut mengalami penurunan dan begitu pula sebaliknya. Apabila pendapatan suatu daerah tinggi maka dapat dipastikan perkembangan ekonomi masyarakat di daerah tersebut mengalami peningkatan, tetapi pendapatan tersebut bukan hanya didapat/diperoleh dari perkembangan ekonomi masyarakat saja, banyak faktor yang mempengaruhi penurunan dan peningkatan pendapatan tersebut, seperti keadaan alam yang tidak dapat diperkirakan keadaannya, kondisi alam ini dapat berubah sewaktu-waktu yang dapat menimbulkan bencana alam yang akan membuat pendapatan suatu Negara mengalami penurunan.

Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga (RTK) dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu satu tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pendapatan masyarakat salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah harus lebih memperhatikan beberapa sektor yang dapat mempengaruhi

pendapatan masyarakat. Terutama kepada masyarakat desa yang berpendapatan rendah karena kurangnya lapangan pekerjaan. Tidak lupa pula, Strategi – strategi pemerintah dalam mengembangkan desa harus didukung penuh oleh masyarakat yang berada di desa itu sendiri. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menyebut pendapatan per kapita masyarakat desa mengalami peningkatan sekitar 40,42% dalam lima tahun. Menurut beliau, infrastruktur yang dibangun menggunakan dana desa berkontribusi meningkatkan produktivitas dan akses pertanian, sehingga mampu menurunkan biaya produksi hingga distribusi. Ini membuat pendapatan petani Indonesia meningkat.

Dengan adanya Program kawasan perdesaan, maka harapan yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, masalah yang akan dianalisis pada penelitian yaitu Pengaruh Program Kawasan Perdesaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di Kawasan Agroekowisata, Kab. Gorontalo.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui pengaruh dari Program Kawasan Perdesaan terhadap tingkat pendapatan masyarakat di kawasan Agroekowisata, Kab. Gorontalo.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

A. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referane dalam implementasi yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan terutama yang berhubungan dengan kawasan AgroEkoWisata

B. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat terhadap progres program kawasan perdesaan di kawasan AgroEkoWisata, kabupaten Gorontalo.

2. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengalaman kepada peneliti mengenai Program Kawasan Perdesaan.

3. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengevaluasi Program Kawasan Perdesaan di Kawasan AgroEkoWisata di Kabupaten Gorontalo.